



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan dalam perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

dan

BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
10. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
11. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II

APBD

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp3.833.982.985.665,00 (tiga triliun delapan ratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) berkurang Rp39.498.450.684,00 (tiga puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp3.794.484.584.981,00 (tiga triliun tujuh ratus sembilan puluh empat miliar empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. pendapatan

| | |
|--------------|-------------------------|
| 1. semula | Rp 3.698.044.359.365,00 |
| 2. berkurang | Rp (76.828.971.059,00) |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| jumlah pendapatan setelah perubahan | Rp 3.621.215.388.306,00 |
| b. belanja | |
| 1. semula | Rp 3.833.982.985.665,00 |
| 2. berkurang | Rp (39.498.450.684,00) |
| jumlah belanja setelah perubahan | Rp 3.794.484.534.981,00 |
| (defisit) setelah perubahan | Rp (173.269.146.675,00) |
| c. pembiayaan | |
| 1. penerimaan | |
| a). semula | Rp 140.038.626.300,00 |
| b). bertambah | Rp 37.330.520.375,00 |
| jumlah penerimaan setelah perubahan | Rp 177.369.146.675,00 |
| 2. pengeluaran | |
| a). semula | Rp 4.100.000.000,00 |
| b). bertambah | Rp 0,00 |
| jumlah pengeluaran setelah perubahan | Rp 4.100.000.000,00 |
| jumlah pembiayaan netto | Rp 173.269.146.675,00 |
| setelah perubahan | |
| sisa lebih pembiayaan anggaran | |
| setelah Perubahan | Rp 0,00 |

Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas :
- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| a. pendapatan asli Daerah | |
| 1. semula | Rp 791.930.764.365,00 |
| 2. bertambah | Rp 19.588.837.621,00 |
| jumlah pendapatan asli Daerah | |
| setelah perubahan | Rp 811.519.601.986,00 |
| b. pendapatan transfer | |
| 1. semula | Rp 2.906.113.595.000,00 |
| 2. berkurang | Rp (96.417.808.680,00) |
| jumlah pendapatan transfer | |
| setelah perubahan | Rp 2.809.695.786.320,00 |
- (2) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pendapatan :

| | | |
|--|----|--------------------|
| a. pajak Daerah | | |
| 1. semula | Rp | 357.000.000.000,00 |
| 2. bertambah | Rp | 0,00 |
| jumlah pajak Daerah | | <hr/> |
| setelah perubahan | Rp | 357.000.000.000,00 |
| b. retribusi Daerah | | |
| 1. semula | Rp | 406.657.586.737,00 |
| 2. bertambah | Rp | 20.716.867.970,00 |
| jumlah retribusi Daerah | | <hr/> |
| setelah perubahan | Rp | 427.374.454.707,00 |
| c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan | | |
| 1. semula | Rp | 22.764.275.046,00 |
| 2. bertambah | Rp | 0,00 |
| jumlah hasil pengelolaan kekayaan | | <hr/> |
| Daerah yang dipisahkan setelah | Rp | 22.764.275.046,00 |
| perubahan | | |
| d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah | | |
| 1. semula | Rp | 5.508.902.582,00 |
| 2. berkurang | Rp | (1.128.030.349,00) |
| jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah | | <hr/> |
| yang sah setelah perubahan | Rp | 4.380.872.233,00 |

(3) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pendapatan :

| | | |
|---|----|----------------------|
| a. pendapatan transfer pemerintah pusat | | |
| 1. semula | Rp | 2.735.211.936.000,00 |
| 2. (berkurang) | Rp | (112.320.187.344,00) |
| jumlah pendapatan transfer | Rp | <hr/> |
| pemerintah pusat setelah perubahan | Rp | 2.622.891.748.656,00 |
| b. pendapatan transfer antar Daerah | | |
| 1. semula | Rp | 170.901.659.000,00 |
| 2. bertambah | Rp | 15.902.378.664,00 |
| jumlah pendapatan transfer antar Daerah | | <hr/> |
| setelah perubahan | Rp | 186.804.037.664,00 |

Pasal 4

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas :

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| a. belanja operasi | |
| 1. semula | Rp 2.816.745.611.462,00 |
| 2. bertambah | Rp 18.142.193.915,00 |
| jumlah belanja operasi | _____ |
| setelah perubahan | Rp 2.834.887.805.377,00 |
| b. belanja modal | |
| 1. semula | Rp 441.230.444.203,00 |
| 2. (berkurang) | Rp (74.164.107.599,00) |
| jumlah belanja modal | _____ |
| setelah perubahan | Rp 367.066.336.604,00 |
| c. belanja tidak terduga | |
| 1. semula | Rp 6.620.000.000,00 |
| 2. bertambah | Rp 1.500.000.000,00 |
| jumlah belanja tidak terduga | _____ |
| setelah perubahan | Rp 8.120.000.000,00 |
| d. belanja transfer | |
| 1. semula | Rp 569.386.930.000,00 |
| 2. bertambah | Rp 15.023.463.000,00 |
| jumlah belanja transfer | _____ |
| setelah perubahan | Rp 584.410.393.000,00 |

(2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis belanja :

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| a. belanja pegawai | |
| 1. semula | Rp 1.637.738.263.963,00 |
| 2. (berkurang) | Rp (23.023.107.392,00) |
| jumlah belanja pegawai | _____ |
| setelah perubahan | Rp 1.614.715.156.571,00 |
| b. belanja barang dan jasa | |
| 1. semula | Rp 1.048.136.566.499,00 |
| 2. bertambah | Rp 40.408.791.307,00 |
| jumlah belanja barang dan jasa | _____ |
| setelah perubahan | Rp 1.088.545.357.806,00 |

| | | |
|----------------------|----|--------------------|
| c. belanja hibah | | |
| 1. semula | Rp | 118.801.671.000,00 |
| 2. bertambah | Rp | 1.497.270.000,00 |
| jumlah belanja bunga | | <hr/> |
| setelah perubahan | Rp | 120.298.941.000,00 |

| | | |
|-------------------------------|----|-------------------|
| d. belanja bantuan sosial | | |
| 1. semula | Rp | 12.069.110.000,00 |
| 2. berkurang | Rp | (740.760.000,00) |
| jumlah belanja bantuan sosial | | <hr/> |
| setelah perubahan | Rp | 11.328.350.000,00 |

(3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis belanja :

| | | |
|----------------------------|----|------------------|
| a. belanja modal tanah | | |
| 1. semula | Rp | 1.013.500.000,00 |
| 2. (berkurang) | Rp | (582.500.000,00) |
| jumlah belanja modal tanah | | <hr/> |
| setelah perubahan | Rp | 431.000.000,00 |

| | | |
|--|----|--------------------|
| b. belanja modal peralatan dan mesin | | |
| 1. semula | Rp | 109.822.472.177,00 |
| 2. (berkurang) | Rp | (9.874.148.372,00) |
| jumlah belanja modal peralatan dan mesin | | <hr/> |
| setelah perubahan | Rp | 99.948.323.805,00 |

| | | |
|--|----|---------------------|
| c. belanja modal gedung dan bangunan | | |
| 1. semula | Rp | 74.845.318.359,00 |
| 2. (berkurang) | Rp | (12.131.603.077,00) |
| jumlah belanja modal gedung dan bangunan | | <hr/> |
| setelah perubahan | Rp | 62.713.715.282,00 |

| | | |
|---|----|---------------------|
| d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi | | |
| 1. semula | Rp | 228.857.141.767,00 |
| 2. (berkurang) | Rp | (53.960.062.150,00) |
| jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi | | <hr/> |
| setelah perubahan | Rp | 174.897.079.617,00 |

| | | |
|-------------------------------------|----|-------------------|
| d. belanja modal aset tetap lainnya | | |
| 1. semula | Rp | 23.082.011.900,00 |
| 2. bertambah | Rp | 2.445.316.000,00 |

| | | |
|--|----|--------------------|
| jumlah belanja modal aset tetap lainnya | | |
| setelah perubahan | Rp | 25.527.327.900,00 |
| e. belanja modal aset lainnya | | |
| 1. semula | Rp | 3.610.000.000,00 |
| 2. (berkurang) | Rp | (61.110.000,00) |
| jumlah belanja modal aset tetap lainnya | | |
| setelah perubahan | Rp | 3.548.890.000,00 |
| (4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas : | | |
| a. semula | Rp | 6.620.000.000,00 |
| b. bertambah | Rp | 1.500.000.000,00 |
| jumlah belanja tidak terduga | | |
| setelah perubahan | Rp | 8.120.000.000,00 |
| (5) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas jenis belanja : | | |
| a. belanja bagi hasil | | |
| 1. semula | Rp | 38.213.667.000,00 |
| 2. bertambah | Rp | 4.851.463.000,00 |
| jumlah belanja bagi hasil | | |
| setelah perubahan | Rp | 43.065.130.000,00 |
| b. belanja bantuan keuangan | | |
| 1. semula | Rp | 531.173.263.000,00 |
| 2. bertambah | Rp | 10.172.000.000,00 |
| jumlah belanja bantuan keuangan | | |
| setelah perubahan | Rp | 541.345.263.000,00 |

Pasal 5

| | | |
|--|----|--------------------|
| (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas: | | |
| a. penerimaan | | |
| 1. semula | Rp | 140.038.626.300,00 |
| 2. bertambah | Rp | 37.330.520.375,00 |
| jumlah penerimaan setelah perubahan | Rp | 177.369.146.675,00 |

| | | |
|--------------------------------------|----|------------------|
| b. pengeluaran | | |
| 1. semula | Rp | 4.100.000.000,00 |
| 2. bertambah | Rp | 0,00 |
| jumlah pengeluaran setelah perubahan | Rp | 4.100.000.000,00 |

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pembiayaan :

| | | |
|---|----|--------------------|
| a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya | | |
| 1. semula | Rp | 140.028.626.300,00 |
| 2. bertambah | Rp | 37.330.520.375,00 |
| jumlah silpa setelah perubahan | Rp | 177.359.146.675,00 |

| | | |
|---|----|---------------|
| b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | | |
| 1. semula | Rp | 10.000.000,00 |
| 2. bertambah | Rp | 0,00 |
| jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah | Rp | 10.000.000,00 |

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pembiayaan :

penyertaan modal Daerah

| | | |
|--|----|------------------|
| a. semula | Rp | 4.100.000.000,00 |
| b. bertambah | Rp | 0,00 |
| jumlah penyertaan modal Daerah setelah perubahan | Rp | 4.100.000.000,00 |

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. lampiran I : ringkasan APBD perubahan yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. lampiran ii : ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
- c. lampiran iii : rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;

- d. lampiran iv : rekapitulasi belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta sub keluaran;
- e. lampiran v : rekapitulasi belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. lampiran vi : rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
- g. lampiran vii : sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah /rencana pembangunan Daerah dengan rancangan APBD;
- h. lampiran viii : sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada rencana kerja Pemerintah Daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
- i. lampiran ix : sinkronisasi program prioritas nasional dan prioritas provinsi dengan program prioritas Kabupaten;
- j. lampiran x : daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan tahun anggaran 2025; dan
- k. lampiran xi : daftar piutang Daerah.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 11 Agustus 2025
BUPATI BREBES,

Ttd.

PARAMITHA WIDYA KUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes



Ditandatangani secara elektronik oleh:

PURWANINGSIH SETYANI, SH, MH.
Penata Tk. I – III/d
NIP. 198712142010012020

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 11 Agustus 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd

Dr. Tahroni, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710609 199802 1 001
LEMBARAN DAERAH KAB.BREBES
NOMOR 3 TAHUN 2025



KABUPATEN BREBES
RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERKURANG/BERTAMBAH |
|------------|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | | SEBELUM (Rp) | SESUDAH (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | | | |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 791.930.764.365,00 | 811.519.601.986,00 | 19.588.837.621,00 |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 357.000.000.000,00 | 357.000.000.000,00 | 0,00 |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 406.657.586.737,00 | 427.374.454.707,00 | 20.716.867.970,00 |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 22.764.275.046,00 | 22.764.275.046,00 | 0,00 |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 5.508.902.582,00 | 4.380.872.233,00 | -1.128.030.349,00 |
| 4.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 2.906.113.595.000,00 | 2.809.695.786.320,00 | -96.417.808.680,00 |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 2.735.211.936.000,00 | 2.622.891.748.656,00 | -112.320.187.344,00 |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 170.901.659.000,00 | 186.804.037.664,00 | 15.902.378.664,00 |
| | Jumlah Pendapatan | 3.698.044.359.365,00 | 3.621.215.388.306,00 | -76.828.971.059,00 |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 2.816.745.611.462,00 | 2.834.887.805.377,00 | 18.142.193.915,00 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.637.738.263.963,00 | 1.614.715.156.571,00 | -23.023.107.392,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.048.136.566.499,00 | 1.088.545.357.806,00 | 40.408.791.307,00 |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 118.801.671.000,00 | 120.298.941.000,00 | 1.497.270.000,00 |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 12.069.110.000,00 | 11.328.350.000,00 | -740.760.000,00 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 441.230.444.203,00 | 367.066.336.604,00 | -74.164.107.599,00 |
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah | 1.013.500.000,00 | 431.000.000,00 | -582.500.000,00 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 109.822.472.177,00 | 99.948.323.805,00 | -9.874.148.372,00 |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 74.845.318.359,00 | 62.713.715.282,00 | -12.131.603.077,00 |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 228.857.141.767,00 | 174.897.079.617,00 | -53.960.062.150,00 |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 23.082.011.900,00 | 25.527.327.900,00 | 2.445.316.000,00 |
| 5.2.06 | Belanja Modal Aset Lainnya | 3.610.000.000,00 | 3.548.890.000,00 | -61.110.000,00 |
| 5.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 6.620.000.000,00 | 8.120.000.000,00 | 1.500.000.000,00 |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 6.620.000.000,00 | 8.120.000.000,00 | 1.500.000.000,00 |
| 5.4 | BELANJA TRANSFER | 569.386.930.000,00 | 584.410.393.000,00 | 15.023.463.000,00 |
| 5.4.01 | Belanja Bagi Hasil | 38.213.667.000,00 | 43.065.130.000,00 | 4.851.463.000,00 |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 531.173.263.000,00 | 541.345.263.000,00 | 10.172.000.000,00 |
| | Jumlah Belanja | 3.833.982.985.665,00 | 3.794.484.534.981,00 | -39.498.450.684,00 |
| | Total Surplus/(Defisit) | -135.938.626.300,00 | -173.269.146.675,00 | -37.330.520.375,00 |
| 6 | PEMBIAYAAN DAERAH | | | |
| 6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 140.038.626.300,00 | 177.369.146.675,00 | 37.330.520.375,00 |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 140.028.626.300,00 | 177.359.146.675,00 | 37.330.520.375,00 |
| 6.1.05 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 |
| 6.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 4.100.000.000,00 | 4.100.000.000,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERKURANG/BERTAMBAH |
|------------|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | SEBELUM (Rp) | SESUDAH (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah | 4.100.000.000,00 | 4.100.000.000,00 | 0,00 |
| | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 4.100.000.000,00 | 4.100.000.000,00 | 0,00 |
| | Pembiayaan Netto | 135.938.626.300,00 | 173.269.146.675,00 | 37.330.520.375,00 |
| 6.3 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kab. Brebes, 11 Agustus 2025

Bupati Brebes,

Ttd.

PARAMITHA WIDYA KUSUMA